

Political Will Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Industri Pangan di Kecamatan Tungkai Ilir

Luthfi Akhiri Ramadhan¹, Izomiddin², Yulion Zalpa³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

E-mail: ahmedmizanalfaras@gmail.com

ABSTRACT

The growth of the food industry means an increase in supply which aims to increase the output of domestic food commodities. Food is the most basic need in human life. One of the areas where the food industry in Indonesia is developing is Banyuasin Regency in South Sumatra, as evidenced by the award received by the Regent of Banyuasin (Askolani) namely the Indonesian Self-Help Food Security Category 2020. In Tungkai Ilir sub-district, it is a sub-district that excels in plantation and food crop sector commodities, he also added that food crop commodities in Tungkai Ilir sub-district are included in IP200 or two harvests in one year. Of course, from this award there is a strong political will from the Regency Government. The method used in this study is a qualitative and descriptive method, which is a field research, the data source used in this study is the main data, namely interviews, for data analysis techniques the author uses three stages, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the theory of political willingness by Brinkerhoff which is associated with the political will of the Banyuasin district government. This theory is able to analyze the political will of the Banyuasin government in improving the food industry in Tungkai Ilir sub-district. The results of this study indicate that the political will of the Banyuasin district government in improving the food industry in Tungkai Ilir sub-district has various ways to do it, such as spending on initiatives in the form of receiving Field Extension Officers (PPL) for each village, then with the help of Production Facilities (SaProdi). Followed by the implementation of political policies to increase food production such as the SeRaSi policy and also the OpLa policy intended for the Tungkai Ilir sub-district and Indonesia as a whole.

Keywords: *Political Will, Government, Food*

ABSTRAK

Pertumbuhan industri pangan berarti peningkatan pasokan yang bertujuan untuk meningkatkan output komoditas pangan dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Salah satu daerah tempat industri pangan di Indonesia berkembang adalah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, terbukti dengan penghargaan yang diterima Bupati Banyuasin (Askolani) yaitu Kategori Ketahanan Pangan Swadaya Indonesia 2020. Di kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan yang unggul dalam komoditas sektor perkebunan dan tanaman pangan, beliau juga menambahkan bahwa untuk komoditas tanaman pangan kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam IP200 atau dua kali panen dalam satu tahun. Tentunya dari penghargaan tersebut terdapat kemauan politik yang kuat dari Pemkab. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif, sumber data yang dipakai dalam adalah data utama yaitu wawancara, untuk teknik analisis data penulis menggunakan tiga tahap yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori *political willingnes* oleh Brinkerhoff yang dikaitkan dengan *political will* pemerintahan kabupaten banyuasin teori ini mampu menganalisa *political will* pemerintahan banyuasin dalam meningkatkan industri pangan di kecamatan Tungkal Ilir. Artikel ini menunjukkan bahwa *political will* pemerintahan kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industri pangan di kecamatan Tungkal Ilir memiliki berbagai macam cara yang dilakukan, seperti pengeluaran inisiatif berupa penerimaan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) untuk setiap desa, kemudian dengan bantuan Sarana Produksi (SaProdi). Dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan politik untuk meningkatkan produksi pangan seperti kebijakan SeRaSi dan juga kebijakan OpLa diperuntukan bagi kecamatan tungkal ilir dan Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kemauan Politik, Pemerintahan, Pangan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri pangan berarti peningkatan pasokan yang bertujuan untuk meningkatkan output komoditas pangan dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Untuk meningkatkan pertumbuhan industri pangan tersebut, tentu perlu adanya kemauan politik (*political will*) oleh pemimpin yang berwenang. *Political will* secara sederhana berarti sebagai niatan pimpinan untuk menentukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama. Kemauan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi umat manusia, oleh karena itu ketersediaan pangan masyarakat harus selalu terjamin, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Karena kelaparan (kekurangan makanan) sebagai proses kausal dari kemiskinan. Oleh karena itu, kecukupan pangan untuk satu spesies merupakan isu yang sangat strategis (Atmanti, 2010:51). Sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang dasar 1945, pasal 27, ayat 02, yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat pada UUD tersebut telah diwujudkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 123, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan Permendagri diatas, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan untuk menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Pertama, implementasi "UU Penciptaan Lapangan Kerja" terkait dengan penyederhanaan, percepatan, kepastian izin, dan persetujuan impor dan ekspor. Kedua, digitalisasi usaha kecil, menengah, dan mikro merupakan bentuk pencapaian dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan agenda transformasi digital. Ketiga, BUMN menjalin kerja sama pendistribusian hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumsi yaitu sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api, yang berkembang dalam bentuk distribusi pangan ke wilayah timur. Keempat, memperkuat kerjasama antar daerah, khususnya dalam penyediaan pangan. Kelima,

membentuk holding BUMN Pangan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional (Limanseto, 2021:1). Dengan kebijakan tersebut di atas, diharapkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dapat terwujud sesuai jadwal.

Salah satu daerah tempat industri pangan di Indonesia berkembang adalah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, terbukti dengan penghargaan yang diterima Bupati Banyuasin (Askolani) yaitu Kategori Ketahanan Pangan Swadaya Indonesia Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan oleh Inews MNC Group untuk mengakui Kabupaten Banyuasin sebagai daerah penghasil beras terbesar keempat di tanah air. Penghargaan ini tidak diragukan lagi adalah Kabupaten Banyuasin yang terus meningkatkan produksi beras untuk menjaga energi lumbung padi nasional (Banyuasin.go.id, 2020). Keberhasilan pemerintahan Kabupaten Banyuasin tersebut didasari oleh Rencana Strategis (RENSTRA), Peraturan Bupati Banyuasin No 63 tahun 2019, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2018-2023. Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan atau mengendalikan ketahanan pangan di Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin menyediakan mesin roda empat yang dibrikan kepada petani. Adanya alat ini akan membantu petani mengelola lahan pertanian. Awalnya, sawah dibajak seminggu sekali untuk mendapatkan satu hektar lahan, tapi alat yang digunakan Empat sampai lima hektar bisa digarap dalam seminggu (Apriani, 2020:1).

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten banyuasin dalam rangka meningkatkan produksi pangan ialah dengan menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor University (IPB). Kerja sama yang dijalin berupa Pengembangan kelembagaan usahatani padi kawasan berkelanjutan menuju agrosistem cerdas industri 4.0. Dipilihnya Banyuasin juga sebagai tindak lanjut dari MoU (nota kesepakatan) yang pernah terjalin dengan IPB sejak tahun 2017 lalu. Setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi fokus penititan IPB dalam membantu Pemkab Banyuasin yakni sentuhan teknologi sosial budaya dan kelembangaan yang diberinama Komunitas Estet Padi (KEP), disini akan dilakukan bisnis secara kolektif dengan merubah pola berpikir petani yang bergerak sendiri namun berkelompok skala besar, kemudian pembenihan dan perternakan (banyuasin, 2020:1).

Salah satu kecamatan di kabupaten Banyuasin yang produksi panganya cukup bagus adalah Kecamatan Tungkal Ilir. Kecamatan ini sebelah utara, selatan, dan baratnya bersebelahan dengan kabupaten Musi Banyuasin dan di sebelah timur bersebelahan dengan Kecamatan Pulau Rimau.

Salah satu anggota PPL (Pembantu Penyuluhan Lapangan), beliau berpendapat bahwa kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan yang unggul dalam komoditas sektor perkebunan dan tanaman pangan, beliau juga menambahkan bahwa untuk komoditas tanaman pangan kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam IP200 atau dua kali panen dalam satu tahun. Untuk mencapai peningkatan produksi pangan dikecamatan Tungkal Ilir yang telah disebutkan sebelumnya, pastilah ada kemauan politik (*political will*) dari pemerintahan Banyuasin agar peningkatan produksi pangan di daerah tersebut bisa tercapai. Kemauan politik tersebut bisa berbentuk inisiatif atau kemauan dari pemerintah yang dapat menghasilkan kebijakan atau bentuk produk politik lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pangan di Kecamatan Tungkal Ilir.

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan di kecamatan Tungkal Ilir sudah termasuk unggul. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai bagaimana kemauan politik pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industri pangan di kecamatan Tungkal Ilir, dimana dalam menganalisis proses tersebut peneliti akan menggunakan teori kemauan politik (*political will*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (sugiyono, 2019:20). Dengan pernyataan lain, metodologi penelitian juga dapat dipandang kegiatan yang sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada dan berguna bagi masyarakat, maupun peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara atau metode kualitatif, penelitian kualitatif menurut David Williams sendiri ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang dalam artian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2018), dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Hardani, 2020:22). Jika dilihat pada focus objek penelitian ini, maka penelitian ini akan menjadi penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

dalam memperoleh data. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang paling tepat yang akan digunakan, hal ini agar benar-benar mendapatkan data yang valid dan reliabel (Ismail, 2019:11)

HASIL DAN DISKUSI

Political will pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di Kecamatan Tungkal Iir. Penelitian dilakukan dengan tiga tahap, Pertama peneliti mereduksi data-data yang telah diperoleh dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema ataupun pola yang berkaitan dengan bentuk *political will* pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industry pangan berdasarkan komponen-komponen dari kerangka teori yang telah ditentukan, Seperti sejauh mana inisiatif PEMKAB Banyuasin dalam peningkatan pangan, adakah keberlanjutan usaha untuk kedepannya, hambatan-hambatan dalam proses peningkatan pangan dan lain sebagainya. Kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh, dengan penyajian ini data yang peneliti menyusun data yang telah didapatkan agar lebih terorganisir, dan tersusun dalam pola hubungan dan semakin mudah dipahami berkaitan dengan *political will* Pemkab Banyuasin dalam peningkatan pangan terkhusus di Kecamatan Tungkal Iir. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari langkah reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan disesuaikan dengan rumusan masalah juga kerangka teori yang telah ditentukan.

Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa kabupaten Banyuasin memperoleh penghargaan ketahanan pangan, penghargaan tersebut diberikan oleh Inews MNC Group untuk mengakui Kabupaten Banyuasin sebagai daerah penghasil beras terbesar keempat di tanah air. Penghargaan ini tidak diragukan lagi adalah Kabupaten Banyuasin yang terus meningkatkan produksi beras untuk menjaga energi lumbung padi nasional. Berawal dari latar belakang tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *political will* pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di Kecamatan Tungkal Iir, *Political will* pemerintah menurut Brinkerhoff dapat diukur dengan beberapa indicator, yaitu inisiatif, kebijakan/program yang diprioritaskan, dukungan *stakeholder* (pemangku kepentingan), komitmen public dan alokasi sumber daya, sanksi yang kredibel, upaya yang berkelanjutan, belajar dan adaptasi.

Inisiatif Pemerintah dapat dipahami sebagai komponen yang menyangkut sumber dorongan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan membentuk program-program dalam mendukung

meningkatkan industri pangan di kecamatan Tungkal Ilir. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya dari Pimpinan Daerah sendiri sebagai bentuk peningkatan pangan.

Diharapkan kelompok lumbung pangan dapat menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya untuk menghasilkan mutu produk beras yang berkualitas dan berkembangnya usaha kelompok yang mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi anggotanya serta dapat meningkatkan stok cadangan pangan di masyarakat (DKP Banyuasin, 2017:1). Inisiatif yang berupa Rapat-rapat diatas merupakan upaya atau kemauan politik pemerintahan dalam meningkatkannya industry pangan, dengan harapan meningkatnya produktivitas tanaman pangan terkhusus padi dan menjadikan kabupaten banyuasin sebagai lumbung padi nasional.

Pilihan kebijakan/program dalam meningkatkan industry pangan, terdapat sebuah kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pertanian yaitu Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Kegiatan yang dilakukan dalam program SERASI fokus pada perbaikan sistem penyediaan air, tanggul, jalan pertanian, pintu air, pompa air, mesin dan peralatan, dan infrastruktur untuk excavator dan excavator. Dengan pengelolaan air yang lebih baik, sawah rawa dapat tumbuh sepanjang tahun baik di musim kemarau maupun musim hujan. Karena itu, petani tidak hanya bisa menanam padi setahun sekali, tapi juga dua atau tiga kali setahun. Selain tanaman padi, program SERASI akan mengembangkan komoditas lain seperti ikan, itik, sayuran dan tanaman hortikultura seperti jeruk untuk mendiversifikasi pendapatan petani. Proyek SERASI diharapkan dapat mengubah rawa pasang surut menjadi lumbung padi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian RI, 2022). Program SERASI bertujuan untuk meningkatkan peran petani dan kelompok tani/gabungan kelompok tani, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian kelompok tani, dan mengembangkan kecamatan dan/atau klaster berbasis usaha.

Dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan pusat, terdapat keselarasan dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten Banyuasin. Tujuh program PEMDA banyuasin terhitung dari 2018-2023 yaitu, infrastruktur bagus, petani bangkit, Banyuasin prima, Banyuasin sehat, Banyuasin cerdas, Banyuasin religious, system pemerintahan terbuka. Dari tujuh program tersebut ada satu program yang selaras dengan kebijakan pemerintahan pusat yaitu Petani Bangkit, program petani bangkit inilah menjadi kebijakan yang diprioritaskan untuk meningkatkan industry pangan di kecamatan Tungkal Ilir maupun di

kabupaten Banyuasin secara keseluruhan. Untuk mewujudkan program tersebut PEMDA Banyuasin juga mengeluarkan 12 (dua belas) gerakan, gerakan inilah yang akan menopang terwujudnya tujuh program tersebut. Adapun 12 gerakan tersebut ialah: Gerakan Siswa Membaca dan Menulis (SIMANIS), Begesa, Gerbang Keren, Gerakan Gotong-royong (GORONG), Gerakan Menuntut Amal (GEMA), Gerakan Tanam Sayur Mayur (GERTAS), Gerakan Pengembangan Tanaman Obat, Rempah dan Umbi-umbian (Gerbang Tobaru), Gerakan Memelihara Ternak Unggas (Gemar Tugas), Gerakan Pengembangan Perikanan Rakyat (Gerbang Perak), Pulau Buah, Program Optimalisasi Rumah Masyarakat (Pro Rakyat) dan Gerakan Peduli Sampah (GPS) (Ariana, 2021).

Lahirnya sebuah kebijakan tentu akan mendapat dukungan penuh dari lingkungan internal seperti eksekutif maupun legislatif, bahkan tidak hanya dari lingkungan internal saja, akan tetapi dari lingkungan eksternal pun akan mendukung sebuah kebijakan yang diperuntukan untuk kemaslahatan Bersama.

Dukungan politik pemerintahan kabupaten banyuasin dalam peningkatan industri pangan tentunya memperoleh dukungan penuh dari lingkungan internal, seperti halnya terdapat berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan sebuah kebijakan terutama kebijakan dalam peningkatan industry pangan ini. terdapat kontribusi dari dinas-dinas dalam peningkatan pangan seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan dinas-dinas lainnya. Kemudian dari sektor eksternalnya, dukungan juga diperoleh dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), Pusri telah mendukung upaya pemerintah untuk melakukan korporatisasi pertanian melalui berbagai skema. Agrosolution merupakan salah satu proyek utama yang telah berjalan sebagai bagian dari transformasi bisnis Pupuk Indonesia dan seluruh anak perusahaannya. Bahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merilis rencana peningkatan pasokan pangan di Banyuasin dan Indonesia secara keseluruhan.

Program yang dimaksud adalah Program makmur, suatu bentuk pendampingan dan pendampingan intensif bagi petani dan penanaman pertanian yang didukung oleh teknologi dan produk retail yang berkualitas. Program Makmur juga memberikan banyak manfaat seperti peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan keuntungan petani, penerapan praktik pertanian unggulan, dan penyediaan pupuk non-subsidi berkualitas tinggi untuk membantu memenuhi kebutuhan petani (PUSRI, 2021). Selain dari Pusri, pemerintah juga memperoleh

dukungan dari stakeholder lainnya seperti Perbankan, perbankan membantu petani untuk pendanaan dalam produksi pertanian agar para petani tidak terlibat dengan para rentenir-rentenir.

Penerapan sanksi/hukum tentunya akan diberlakukan kepada para oknum yang melakukan pelanggaran, baik berupa penimbunan pupuk, penimbunan benih atau bibit, pengelapan saluran dana dan pelanggaran lainnya dapat dipastikan bagi para pelanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pelanggaran di bidang pendanaan/penganggaran khususnya, dimana dana bantuan pemerintah tidak digunakan sesuai dengan pedoman, penerima bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama penerima bantuan pemerintah. Bantuan dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Seperti yang dijelaskan dalam petunjuk teknis (JukNis) tahun 2017 dalam pasal 08 menjelaskan bahwa apabila Pihak B tidak dapat menggunakan dana bantuan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan Pasal 01, Pihak A berhak untuk menarik secara sepihak seluruh dana yang diterima oleh Pihak B. mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama ini.

Terkait Adaptasi dan belajar oleh Pemkab Banyuasin dalam perihal peningkatan industry pangan di Kecamatan Tungkal Ilir tentu selalu dilakukan. Dalam peningkatan industry pangan adaptasi yang dilakukan pemerintah salah satunya ialah Adaptasi iklim, seperti memberikan bimbingan dan peningkatan pemahaman dalam mengidentifikasi dampak perubahan iklim, mendorong dan mengarahkan upaya adaptasi pertanian dan rencana aksi untuk mengurangi atau memanfaatkan variabilitas dan dampak perubahan iklim, mendorong dan mengarahkan upaya untuk mengidentifikasi teknologi yang ada dan sederhana (*indigenous technology and local wisdom*), serta perakitan teknologi untuk adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan sistem informasi iklim dan sosialisasi teknologi inovatif untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Kemudian dalam perihal pembelajaran pemerintahan kabupaten akan menurunkan narasumber yang akan memberikan pengetahuan terkait peningkatan produksi pangan, seperti halnya bagaimana pengolahan tanah dan pemupukan dasar, penggunaan pestisida secara sederhana, pembinaan petani penangkaran benih padi dan pengelolaan tanah sawah, dan pengetahuan lainnya terkait dengan peningkatan produksi pangan di kecamatan Tungkal Ilir yang terus diadakan setiap satu bulan satu kali. Hal lainnya juga dilakukan oleh para PPL yang bertugas dimasing-masing desa akan melakukan pertemuan pada awal bulan dan akhir bulan, dalam pertemuan tersebut selain membicarakan terkait kemajuan yang telah di peroleh para petani

dalam pertemuan tersebut juga akan membahas hal apa saja yang dikeluhkan oleh para petani terkait produksi pangan.

Upaya apabila dilakukan hanya sebatas dalam satu tahun merupakan ciri dari keinginan politik yang lemah dan / atau goyah. Akan tetapi dilihat dari observasi yang peneliti lakukan upaya pemerintah dalam peningkatan pangan ini memiliki keberlanjutan, dapat dilihat dari program-program yang telah dikeluarkan seperti Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang difokuskan pada tahun 2019, program Bantuan Sarana Produksi (SaProdi) untuk tahun 2020, dan pada tahun 2021 ialah Optimalisasi Lahan (OPLA). Selain dari program yang dikeluarkan, pemerintah juga melakukan langkah dalam mencapai usaha yang berkelanjutan tersebut, seperti Diversifikasi pangan bertujuan untuk mengantisipasi krisis, menyediakan alternatif beras, mendorong pembangunan ekonomi, dan mencapai sumber daya manusia yang sehat. Adanya diversifikasi bahkan dapat meningkatkan kualitas tanah dan menekan serangan hama dan penyakit.

Penerapan pertanian terpadu (*comprehensive farming*) untuk mengoptimalkan lahan sawah merupakan konsep peningkatan pendapatan ekonomi lahan secara berkelanjutan berbasis lingkungan dan perpaduan antara pertanian dan peternakan. Konsepnya adalah zero waste, yaitu meminimalkan penggunaan eksternal dan memaksimalkan potensinya. Misalnya, pemerintah baru-baru ini menggunakan pupuk tradisional untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Model pertanian ini merupakan salah satu terobosan dalam meningkatkan hasil panen dan secara keseluruhan memperkuat ketahanan pangan nasional. Penerapan Teknologi Industri 4.0 di segala bidang, termasuk pertanian, tidak bisa lepas dari Revolusi Industri 4.0 yang menggunakan pertanian modern untuk mencapai efisiensi. Contohnya adalah melalui penerapan teknologi mutakhir seperti pemupukan menggunakan drone, kemudian awalnya masih menggunakan cara manual untuk mengolah lahan, saat ini menggunakan mesin roda empat Alsintan, IP Alsintan di kecamatan Tungkal Ilir meningkat menjadi IP200 (satu tahun dua kali panen). Upaya ini tentunya akan meningkatkan kualitas dan efisiensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Dari keberlanjutan usaha tersebut dapat dilihat bahwasanya upaya serta kemauan politik dari pemerintahan dalam meningkatkan industri pangan terus berjalan, serta dukungan masyarakat dan implementasi kebijakan yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan membuktikan bahwa peningkatan industri pangan tersebut akan terus dilaksanakan, bukti lain

dari peningkatan industri pangan tersebut ialah dengan meningkatnya produksi padi yang mulanya satu tahun satu kali panen, kini meningkat menjadi satu tahun dua kali panen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis yaitu bagaimana *political will* pemerintahan kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industri pangan di Kecamatan Tungkal Ilir. Adapun untuk saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan secara lebih dari Pemda Banyuasin terhadap adaptasi dan pembelajaran tentang penggunaan alat modern bagi para petani dan pembelajaran bagi para PPL dalam hal peningkatan industri pangan.
2. Untuk mencapai kesejahteraan para petani, Pemda Banyuasin perlu penanganan khusus dalam hal pemasaran hasil tanaman pangan berjenis padi ini, agar kemakmuran petani bisa tercapai secara nyata.

KESIMPULAN

Dapat diketahui bahwa *political will* pemerintahan kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industri pangan di kecamatan Tungkal Ilir memiliki berbagai macam cara yang dilakukan, seperti pengeluaran inisiatif berupa penerimaan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) untuk setiap desa, kemudian dengan bantuan Sarana Produksi (SaProdi). Dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan politik untuk meningkatkan produksi pangan seperti kebijakan SeRaSi dan juga kebijakan OpLa diperuntukan bagi kecamatan tungkal ilir dan Indonesia secara keseluruhan.

Adapun faktor lain dalam meningkatkan industri pangan di kecamatan tungkal ilir oleh pemkab banyuasin ialah dengan melakukan Mobilisasi dukungan stakeholder, dukungan pun diperoleh dari lingkungan internal seperti OPD-OPD Banyuasin dan juga dari eksternal seperti PT PUSRI sebagai penyuplai pupuk bersubsidi dan perbankan. Kemudian pemkab juga melakukan pengajaran baik itu berupa Adaptasi dan belajar, pemerintahan kabupaten banyuasin terus memberikan wawasan terhadap adaptasi dan pembelajaran kepada para petani untuk menggunakan alat penggarap sawah atau alsintan, penggunaan pupuk tradisional, pengelolaan lahan sawah agar tetap subur, serta yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Hardani, and Dkk. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

- Apriani, D. (2020, Juli 2). Banyuasin Komitmen Jaga Ketahanan Pangan. *Media Indonesia*, P. 1. Diambil dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/324903/banyuasin-komitmen-jaga-ketahanan-pangan/>.
- Ariana, N. (2021, juni 25). *12 Gerakan Bersama Masyarakat Banyuasin Mampu Menurunkan Kemiskinan*. Retrieved from RRI.co.id:
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebudayaan, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). *Unpacking the concept of political will to confront corruption*. *U4BRIEF*, 01.
- DKP banyuasin. (2019, desember 12). *Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin Menggelar Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2019*. Retrieved from [dkp.banyuasin.go.id](https://dkp.banyuasinkab.go.id): <https://dkp.banyuasinkab.go.id/2019/12/dinas-ketahanan-pangan-banyuasin-menggelar-rapat-koordinasi-dewan-ketahanan-pangan-tahun-2019/>.
- DKP Banyuasin. (2017, februari 08). Rapat Koordinasi Kelompok Lumbung Pangan. Retrieved from dkp.banyuasinkab.go.id: <https://dkp.banyuasinkab.go.id/2017/02/rakor-kelompok-lumbung-pangan/>
- Editor5. (2020, September 8). IPB Kembangkan Kelembagaan Usaha Tani Agrosistem Cerdas Industri 4.0 Di Banyuasin. *Berita Kabupaten Banyuasin*, P. 1. Diambil dari <https://banyuasinkab.go.id/2020/09/ipb-kembangkan-kelembagaan-usaha-tani-agrosistem-cerdas-industri-4-0-di-banyuasin/>.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hastarini, Dwi Atmanti. 2010. Kajian Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol 21. No 1. Januari 2010. 51 – 60 hal.
- Ismail. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Kementerian Pertanian RI. (2022, februari 3). *Program SERASI Mengubah Lahan Menjadi Produktif Mendapat Dukungan DPR*. Retrieved from [Pertanian.go.id](https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3838): <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3838>
- Limanseto, H. (2021, Mei 5). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkmmenjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Mastaldiah. (2020). *Political Will Pemerintahan Kota Palembang dalam Mengatasi Stunting*. Palembang: UIN Raden Fatah .
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- PUSRI. (2021, september 09). *Program Makmur Genjot Produktivitas Jagung di Banyuasin*. Retrieved from [Pusri.go.id](https://www.pusri.co.id): <https://www.pusri.co.id/eng/news-amp-event-mass-media/program-makmur-genjot-produktivitas-jagung-di-banyuasin/>
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta Bandung. 20 hal.
- Untung. (2019). *Metodologi Penelitian: Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Sosial*. Yogyakarta: Litera.